

Ombudsman RI Nilai Pelayanan Publik Buton Selatan Bebas Maladministrasi



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- emerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menerima Ringkasan Eksekutif Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, S.Pd., M.Si., kepada Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., di Kantor Ombudsman RI Sultra, Kendari, Rabu (3/6/2026).

Penyerahan laporan tersebut menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI dalam

mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Selain itu, hasil penilaian juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelayanan kepada masyarakat.

Dalam paparannya, Mastri Susilo menjelaskan bahwa penilaian maladministrasi yang dilakukan Ombudsman RI bersifat dinamis. Objek penilaian dapat berubah setiap tahun, baik melalui penambahan maupun pengurangan instansi yang menjadi fokus evaluasi.

Untuk Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, penilaian tahun

Lanjut ke Hal: 7

Damkar Buton Selatan dan Yon TP 871 Asah Kemampuan Penanganan Kebakaran Terpadu



Laporan: Ardi

BUTON SELATAN, BP- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan bersama Yon TP 871 Lamaindo menggelar latihan gabungan penanggulangan kebakaran di Lapangan Lakarada, Kamis

(4/6/2026). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta membangun kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran dan keadaan darurat di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Latihan yang mel-

ibatkan sekitar 14 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan dua regu prajurit Yon TP 871 Lamaindo itu difokuskan pada pengenalan teori dasar kebakaran, simulasi pemadaman api, prosedur evakuasi, hingga pengoperasian

Lanjut ke Hal: 7

Polda Sultra Tetapkan Oknum Pengacara Inisial LZN Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat Sengketa Tanah di Labalawa

POIN PENTING

- ✓ Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/47/VI/RES.1.9/2026/ Dit Reskrimum tanggal 3 Juni 2026
- ✓ Pengaduan diajukan ke Bareskrim Polri sejak tahun 2024
- ✓ Sengketa tanah bermula dari putusan PN Baubau 9 Mei 2017 dan dikuatkan PT Sultra 12 September 2017
- ✓ Putusan dibatalkan MA pada 16 Mei 2018, PK diputus MA pada 29 Juni 2020
- ✓ Dugaan pelanggaran: Pasal 278 Ayat 1 juncto Pasal 391 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional)

MARKAS POLDA SULTRA
Polda Sulawesi Tenggara menetapkan oknum pengacara inisial LZN sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa tanah di Kota Baubau.

PIHAK PENGADU & WARGA LABALAWA
Pengadu Risman Boti bersama warga Labalawa mendukung proses hukum dalam pengusutan dugaan pemalsuan surat tanah yang melibatkan oknum pengacara LZN.

RISMAN BOTI
Dokumen yang dipersiapkan telah diuji di Puslabfor Bareskrim Polri. Hasilnya dinyatakan NON IDENTIK atau diduga palsu, menjadi dasar penetapan LZN sebagai tersangka.

PROSES HUKUM TERUS BERJALAN, KEADILAN UNTUK MASYARAKAT ADALAH PRIORITAS!

Laporan: La Harman Momi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan seorang oknum pengacara berinisial LZN sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa tanah di Kota Baubau. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Nomor: S.Tap/47/VI/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir-reskrimum) Polda Sultra tertanggal 3 Juni 2026.

Informasi itu disampaikan Risman Boti selaku pihak pengadu melalui siaran pers yang diterima media ini, Kamis (4/6/2026). Menurut Risman, penetapan tersangka terhadap LZN merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang sebelumnya diajukan ke Bareskrim Mabes

Polri pada tahun 2024. Kasus tersebut bermula dari sengketa tanah di Kota Baubau yang sebelumnya telah bergulir melalui proses perdata di Pengadilan Negeri (PN) Baubau. Dalam perkara itu, pihak penggugat yang disebut sebagai SS dan kawan-kawan sempat memenangkan

gugatan berdasarkan putusan PN Baubau tertanggal 9 Mei 2017. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 12 September 2017. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan melalui putusan kasasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Mei 2018.

Selanjutnya, upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak penggugat juga diputus Mahkamah Agung pada 29 Juni 2020.

Diduga Gunakan Dokumen Palsu di Proses Kasasi dan PK

Risman menyebut pihaknya menemukan dugaan unsur kebohongan dalam permohonan kasasi yang diajukan LZN selaku kuasa hukum pihak tergugat dalam perkara

tersebut.

Menurutnya, dugaan tersebut diperkuat dalam dokumen kontra memori Peninjauan Kembali yang diajukan di Mahkamah Agung dengan melampirkan dokumen yang diduga palsu.

“Dugaan kebohongan LZN sebagai kuasa hukum diperjelas dalam kontra memori Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan melampirkan berkas dugaan surat palsu,” ujar Risman

Lanjut ke Hal: 7

Kredit Fiktif Terbongkar! Sales Akulaku Baubau Rugikan Perusahaan Rp255 Juta, Dipakai Judi Online



Polres Baubau Ungkap Kasus Penggelapan dan Penipuan oleh Sales Akulaku, Kerugian Capai Rp255 Juta

Laporan: Firman

BAUBAU, BP - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Baubau mengungkap kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang melibatkan seorang sales marketing perusahaan

pembiayaan digital PT Akulaku Finance Indonesia di Kota Baubau.

Kasus tersebut terungkap setelah pihak perusahaan menemukan adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh salah satu sales agen sejak April hingga Novem-

ber 2025.

Pelaku diketahui berinisial AA alias AZ (22), warga Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Sementara korban dalam perkara tersebut adalah PT Akulaku Finance Indonesia yang diwakili oleh Yohan

Prawira Pakpahan.

Kasat Reskrim Polres Baubau, AKP Gayuh Pambudhi Utomo, S.I.K., menjelaskan bahwa kasus bermula saat pihak perusahaan menerima laporan adanya ke-

Lanjut ke Hal: 7

Polda Sultra Tetapkan Oknum Pengacara Inisial LZN Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat Sengketa Tanah di Labalawa

dalam siaran persnya. Ia menyebut dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan pemalsuan surat dan penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 278 ayat 1 juncto Pasal 391 KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil Uji Forensik Disebut

Non Identik

Dalam siaran pers tersebut, Risman juga menjelaskan bahwa penyidik Subdit II Ditreskrim Polda Sultra telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait perkara tersebut.

Selain itu, barang bukti dokumen yang dipersoalkan juga telah diuji oleh Pusat Laboratorium

Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri di Sentul, Bogor.

“Hasil uji barang bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri jelas dinyatakan non identik atau diduga palsu,” katanya.

Risman mengapresiasi langkah penyidik Polda Sultra yang dinilai telah bekerja profesional dalam menangani perkara tersebut.

Ia juga meminta

agar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan pemalsuan surat tanah itu dapat diungkap secara menyeluruh melalui proses hukum yang sedang berjalan.

“Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah di Kota Baubau agar berhati-hati dalam menerbitkan dokumen hak atas tanah,”ujarnya. (*)

Kredit Fiktif Terbongkar! Sales Akulaku Baubau Rugikan Perusahaan Rp255 Juta, Dipakai Judi Online



janggala transaksi dari salah satu sales agen di Baubau.

“Korban bersama rekan kerjanya kemudian melakukan monitoring dan analisis sistem. Dari hasil pendalaman ditemukan beberapa customer tidak melakukan pembayaran dan ternyata terdapat pengajuan kredit menggunakan identitas nasabah tanpa sepengetahuan mereka,” ujar AKP Gayuh dalam konferensi pers.

Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui memanfaatkan posisinya sebagai sales marketing PT Akulaku Finance Indonesia dengan mengajukan limit kredit menggunakan data pribadi sejumlah nasabah tanpa izin.

Setelah limit kredit berhasil diperoleh, pelaku kemudian mengeluarkan barang berupa sembilan unit iPhone berbagai tipe dari toko rekanan PT Akulaku Finance Indonesia, yakni iBox

Lippo Plaza Buton.

Barang-barang tersebut kemudian dijual kembali secara online. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk kebutuhan pribadi, termasuk bermain judi online dan trading cryptocurrency.

“Akibat perbuatan pelaku, PT Akulaku Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp255.881.321,” ungkap AKP Gayuh.

Kasus ini mulai ditangani Unit II Sateskrim Polres Baubau setelah laporan polisi diterima pada 18 Desember 2025. Polisi kemudian memeriksa tujuh orang saksi dan mengamankan sembilan dokumen barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada 19 Februari 2026, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan lima hari kemudian pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Selain dokumen kerja sama perusahaan dan slip gaji

pelaku, polisi juga mengamankan laporan hasil investigasi internal perusahaan, surat somasi, hingga surat pernyataan tulisan tangan dari pelaku.

Saat ini tersangka telah diamankan di Polres Baubau berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XII/2025/SPKT/RES.BAUBAU/Sultra tanggal 4 Desember 2025.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 488 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dan Pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Keadilan PT Akulaku Finance Indonesia, Meyli Rita Rahmayanti Siburian, mengatakan pihak perusahaan memiliki komitmen zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan yang dilakukan oknum internal maupun eksternal.

“Kami langsung

melakukan pemberhentian terhadap pelaku setelah temuan ini didalami oleh tim anti-fraud kami, kemudian menyerahkan proses hukum kepada Polres Baubau,”ujarnya.

Ia menjelaskan, perusahaan juga tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk 12 identitas customer yang digunakan dalam pengajuan kredit.

Menurutnya, apabila para customer tersebut terbukti menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, maka perusahaan akan menghapus tagihan yang muncul akibat tindak pidana tersebut.

“Kami menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga data pribadi, termasuk akun, OTP, dan password layanan pembiayaan digital agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,”katanya. (*)

2025 dilakukan pada RSUD Kabupaten Buton Selatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Hasil penilaian ini diharapkan menjadi pemacu bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta menghadirkan pelayanan yang responsif, profesional, dan bebas dari maladministrasi,” ujar Mastri Susilo.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperoleh kategori kualitas pelayanan “Cukup”, tingkat kepatuhan ‘Tinggi’, dengan opini ‘Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi’.

Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada

kepentingan masyarakat.

Menanggapi hasil tersebut, Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas pendampingan dan evaluasi yang telah diberikan.

Menurutnya, hasil penilaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

“Bagi kami, capaian ini bukan sekadar soal nilai atau kategori yang diperoleh, tetapi menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin baik, mudah, cepat, dan berintegritas. Karena itu, kami juga telah meminta asistensi kepada Ombudsman untuk mendukung

langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses penilaian tersebut. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang menjadi objek penilaian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

“Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,”tutupnya. (*)

Damkar Buton Selatan dan Yon TP 871 Asah Kemampuan Penanganan Kebakaran Terpadu

unit mobil pemadam kebakaran. Kegiatan ini juga menjadi ajang pengenalan armada pemadam baru yang dimiliki Yon TP 871 Lamaindo.

Komandan Damkar dan Penyelamatan Buton Selatan, LM Hikmah Poto, SH, mengatakan latihan bersama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam penanganan kebakaran. “Latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, pemahaman teori dasar kebakaran, simulasi pemadaman, serta memperkenalkan unit pemadam kebakaran baru milik Yon TP 871 Lamaindo,”ujarnya.

Menurut Hikmah, salah satu fokus utama latihan adalah penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan agar setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya saat menghadapi kebakaran. “Saat berada di lokasi kejadian, personel harus mengetahui pembagian tugas secara jelas, mulai dari pengendalian selang utama, pengamanan jalur air, hingga pelaksanaan evakuasi,”katanya.

Selain aspek prosedural, latihan juga menitikberatkan

pada konsep berbagi sumber daya (resource sharing) antara kedua institusi. “Dinas Damkar memiliki personel yang terlatih dalam teknik pemadaman, sementara Yon TP 871 memiliki kekuatan personel yang disiplin dan siap bergerak cepat. Penggabungan kemampuan ini akan membuat proses penanganan kebakaran lebih efektif,” ujar Hikmah.

Dalam sesi pembelajaran teori, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep Fire Triangle atau Segitiga Api yang terdiri atas unsur bahan bakar, oksigen, dan panas. Ketiga unsur tersebut menjadi syarat utama terjadinya kebakaran. Peserta juga mempraktikkan berbagai teknik pemadaman, seperti smothering atau menghilangkan pasokan oksigen, cooling dengan menurunkan suhu menggunakan air, serta starving dengan memisahkan sumber bahan bakar dari titik api.

Secara nasional, penguatan kapasitas personel pemadam kebakaran menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya frekuensi kejadian kebakaran di berbagai daerah. Data Kementerian Dalam Negeri

dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebakaran permukiman, fasilitas umum, dan lahan masih menjadi salah satu bencana yang paling sering ditangani oleh pemerintah daerah. Karena itu, latihan terpadu dan peningkatan kompetensi petugas menjadi bagian penting dalam mitigasi risiko bencana.

Di tingkat internasional, konsep kolaborasi antara pemadam kebakaran dan unsur militer telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Pengalaman penanganan kebakaran hutan besar di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keterpaduan sumber daya, disiplin personel, dan kesamaan prosedur operasional mampu meningkatkan efektivitas respons darurat sekaligus meminimalkan risiko korban maupun kerugian material.

Melalui latihan gabungan ini, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kemampuan personel pemadam kebakaran dan prajurit Yon TP 871 Lamaindo semakin terasah, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat ketika menghadapi situasi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. (*)

Prabowo Siapkan Pelantikan Pimpinan Baru BGN Pekan Ini, Istana Ungkap Alasan Pelantikan Pimpinan Baru BGN Ditunda



Istana ungkap pelantikan pimpinan baru BGN pengganti Dadan Cs pekan ini.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan pelantikan tiga pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) pada pekan depan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembenahan tata kelola lembaga yang menjadi ujung tombak Program Makan Bergizi Gratis. Meski pelantikan belum digelar, ketiga pejabat tersebut telah sah menjabat sejak diterbitkannya Keputusan Presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sengaja tidak langsung menggelar pelantikan agar para pimpinan baru dapat lebih fokus melakukan konsolidasi internal dan perbaikan sistem kerja di lingkungan BGN pada masa awal kepemimpinan mereka.

"Kami agenda-kan di minggu depan, karena kami berpikir beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di BGN," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Dalam susunan kepemimpinan baru tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, dua posisi Wakil Kepala BGN dipercayakan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menurut Prasetyo, penunjukan Nanik didasarkan pada rekam jejak dan pengalamannya selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Posisi tersebut membuatnya memahami secara menyeluruh alur kerja, program, hingga mekanisme pengawasan yang dijalankan lembaga tersebut.

"Kalau secara administratif, hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan BGN semenjak Keputusan Presiden ditetapkan," ujar Prasetyo.

Pemerintah juga menilai Nanik memiliki kedisiplinan tinggi dalam menjalankan prosedur operasional standar, manajemen organisasi, serta pengawasan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program pemerintah.

"Kedisiplinan

dalam menjalankan SOP-SOP, ke-disiplinan dalam menjalankan manajemen di BGN, kedisiplinan juga dalam menjaga kualitas makanan yang kita sajikan ke seluruh penerima manfaat, itu beberapa dasar pertimbangan," lanjut Prasetyo.

Perubahan kepemimpinan di BGN terjadi setelah Dadan Hindayana diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

Secara historis, BGN merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas nasional yang mulai dijalankan pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan guna mendukung pamban-

gunaan sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045.

Di tingkat internasional, program penyediaan makanan bergizi bagi pelajar telah lama diterapkan di berbagai negara. Amerika Serikat menjalankan National School Lunch Program sejak 1946, sementara Jepang mengembangkan program makan siang sekolah atau Kyushoku sejak pasca-Perang Dunia II. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) serta UNICEF juga menempatkan program makanan sekolah sebagai instrumen penting dalam menekan stunting, meningkatkan kesehatan anak, dan mendukung kualitas pendidikan.

Dengan kepemimpinan baru, pemerintah berharap BGN mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas program, serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan untuk menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. (*)

Pulih Total, Jokowi Siap Temui Warga di Lampung, NTT, dan Jawa Barat



Presiden ke-7 RI Jokowi akan mengawali blusukan keliling Indonesia dengan tiga titik awal rencana kunjungan, yakni Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memastikan dirinya telah pulih sepenuhnya dan siap kembali melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Pada Juni 2026 ini, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Barat menjadi tiga provinsi pertama yang akan disambangi dalam rangkaian safari nasional yang dilakukan secara bertahap.

Jokowi menyebut dirinya telah menerima banyak undangan dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, ia berencana memperbanyak interaksi langsung dengan warga sekaligus memberikan motivasi dalam sejumlah kegiatan yang akan digelar di daerah.

"Kondisi saya sudah pulih 100 persen dan siap kembali bertemu masyarakat," kata Jokowi sebagaimana disampaikan dalam keterangannya terkait agenda lawatan tersebut.

Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan tahap awal dari agenda yang lebih luas. Menurut dia, Jokowi tidak mungkin mengunjungi seluruh 38 provinsi dalam satu kesempatan sehingga perjalanan akan dilakukan secara bertahap.

"Tidak mungkin sekali kunjungan langsung menjang-

kau 38 provinsi. Tiga provinsi ini menjadi awal sebelum dilanjutkan ke daerah lainnya," ujar Bestari dalam program Inside Politics CNN Indonesia, Selasa (2/6).

Bestari mengatakan setiap kunjungan tidak hanya terpusat pada satu lokasi. Dalam satu provinsi, Jokowi dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di beberapa kota untuk memenuhi berbagai undangan yang telah masuk dari masyarakat dan kelompok pendukungnya.

Selain bertemu kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jokowi juga akan menghadiri pertemuan dengan relawan, tokoh masyarakat, serta sejumlah komunitas yang selama ini memiliki hubungan komunikasi dengan dirinya.

"Diutamakan PSI, tetapi ada juga undangan dari relawan dan tokoh masyarakat yang ingin bertemu Pak Jokowi," kata Bestari.

Ia menegaskan agenda tersebut tidak terkait dengan kampanye politik. Menurutnya, kunjungan itu lebih menitikberatkan pada silaturahmi dan pemenuhan undangan masyarakat di berbagai daerah.

"Kalau dibilang kampanye tentu belum waktunya. Ini lebih kepada silaturahmi dan memenuhi undangan masyarakat," ujarnya.

Secara historis, kegiatan blusukan telah menjadi ciri khas kepemimpinan Jokowi sejak menjabat Wali Kota Surakarta pada 2005, kemudian berlanjut saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI periode 2014-2024. Pola kunjungan langsung ke masyarakat tersebut kerap digunakan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memantau kondisi lapangan secara langsung.

Dalam konteks internasional, pendekatan serupa juga dilakukan sejumlah pemimpin dunia. Mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter, maupun mantan Kanselir Jerman, Angela Merkel, dikenal aktif melakukan kunjungan lapangan dan dialog publik setelah maupun selama menjabat sebagai bagian dari upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Rencana safari Jokowi ke Lampung, NTT, dan Jawa Barat diperkirakan menjadi awal dari rangkaian kunjungan yang lebih luas sepanjang tahun. Dengan kondisi kesehatan yang diklaim telah pulih sepenuhnya, mantan kepala negara itu menegaskan kesiapannya untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai daerah Indonesia. (*)

Puteri Indonesia 2026 Siap Kampa-nyekan PP TUNAS hingga Forum Global



-Jajaran Puteri Indonesia 2026 menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari gerakan nasional perlindungan anak di ruang digital dengan mendukung sosialisasi Peraturan Pemerintah

Laporan: Lisna

JAKARTA, BP-Jajaran Puteri Indonesia 2026 menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari gerakan nasional perlindungan anak di ruang digital dengan mendukung sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Dukungan itu tidak hanya diwujudkan melalui kampanye publik, tetapi juga melalui rencana edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Puteri Pendidikan 2026, Gisella Agnes Silalahi, mengatakan pihaknya siap terlibat aktif dalam menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak di dunia maya.

"Saya ingin ikut menyosialisasikan PP TUNAS ke sekolah-sekolah. Selain itu, saya juga akan mengangkat isu perlindungan anak di forum internasional untuk menjadikan ini sebagai gerakan global," ujar Gisella.

Langkah tersebut mendapat perhatian pemerintah karena tantangan yang dihadapi anak-anak di ruang digital terus meningkat. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital, jumlah pengguna

internet di Indonesia kini mencapai sekitar 229 juta orang dengan rata-rata penggunaan internet lebih dari tujuh jam per hari. Tingginya intensitas penggunaan internet dinilai memperbesar risiko paparan anak terhadap berbagai ancaman digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekosistem digital nasional. Menurut dia, ancaman yang dihadapi anak tidak hanya berupa konten negatif, tetapi juga risiko interaksi dengan orang asing, eksploitasi daring, perundungan siber, hingga kecanduan penggunaan platform digital.

"Perlindungan anak di ruang digital harus melihat profil risiko yang dihadapi anak, mulai dari risiko kontak, risiko konten, hingga risiko kecanduan. Karena itu PP TUNAS mengatur langkah perlindungan yang proporsional sesuai tingkat risiko platform," kata Meutya.

Pemerintah menilai regulasi tersebut menjadi semakin penting di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap keselamatan anak di internet. Dalam satu dekade terakhir, sejumlah negara seperti Inggris, Australia, dan negara-negara Uni Eropa telah memperkuat regulasi perlindungan anak melalui kebijakan keamanan daring, pembatasan akses usia, serta kewajiban platform digital melaku-

kan mitigasi risiko terhadap pengguna anak.

Di Indonesia, upaya perlindungan anak di ruang digital sebenarnya telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai kebijakan literasi digital nasional yang digencarkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Namun, pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial mendorong perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi anak-anak sebagai kelompok rentan.

Meutya mencontohkan salah satu bentuk implementasi perlindungan yang telah dilakukan perusahaan teknologi global. Platform gim daring Roblox, misalnya, telah menyesuaikan kebijakan bagi pengguna di Indonesia dengan menonaktifkan fitur kontak bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun guna mengurangi risiko interaksi yang berpotensi membahayakan anak.

Dukungan terhadap PP TUNAS juga disampaikan Puteri Indonesia 2026, Agnes Aditya Rahajeng. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat mengenai meningkatnya ancaman pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan di media sosial yang menasar anak-anak dan remaja.

"Anak di bawah umur rentan terhad-

adap bahaya pornografi, pelecehan seksual, dan bullying di media sosial. Meskipun media sosial merupakan sarana mencari informasi yang sangat powerful, tetap diperlukan pengawasan dan perlindungan," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, menilai perubahan pola tumbuh kembang anak pada era digital perlu menjadi perhatian bersama. Ia melihat anak-anak masa kini lebih banyak berinteraksi dengan gawai dibandingkan dengan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih kuat dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

"Perlindungan anak adalah isu universal. Ketika Indonesia berbicara tentang masa depan digital, maka keselamatan anak harus menjadi bagian penting dari percakapan global," tegas Meutya. Dukungan dari Yayasan Puteri Indonesia bersama Victoria Titisari Koesasi Putri, Karina Moudy Widodo, Glorya Stevany Yame Nayoan, dan Athalla Hartiana Putri Hardian diharapkan memperluas jangkauan edukasi publik sehingga tercipta ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. (*)

Menko Polkam Tekankan Sinergi Daerah untuk Dukong Pembangunan



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamar Chaniago, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas wilayah, merespons persoalan masyarakat secara cepat, serta membangun kepercayaan publik yang kuat. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Sulawesi di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Sabtu (30/5/2026).

Forum yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), para kepala daerah, dan unsur Forkopimda se-Sulawesi itu menjadi wadah penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan serta menjaga keamanan kawasan yang dinilai strategis bagi pertumbuhan nasional.

Dalam arahannya, Djamar Chaniago mengatakan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, seluruh unsur pemerintah dan Forkopimda diminta memperkuat kekompakan serta meningkatkan sensitivitas terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Program dan pembangunan tidak bisa dilaksanakan jika tidak kondusif di daerah. Kita harus peka terhadap kondisi masyarakat kita, ketika sudah mengetahui persoalan yang ada maka harus segera diselesaikan," ujar Djamar Chaniago.

Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

Menurutnya, membangun kepercayaan publik membutuhkan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya tugas satu institusi semata.

"Kita harus meningkatkan kepercayaan masyarakat kita dan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Semua unsur harus bekerja bersama-sama," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Forkopimda dalam menjaga kerukunan sosial, keamanan, serta ketertiban umum. Ia menilai stabilitas menjadi syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan program pembangunan.

"Pembangunan tidak akan berjalan tanpa suasana yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan harus terus diperkuat," kata Tito.

Mendagri juga mengungkapkan bahwa Pulau Sulawesi memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Meskipun jumlah penduduknya sekitar 7,35 persen dari total populasi Indonesia, kawasan ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor pertanian, perikanan, dan industri hilirisasi.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Sulawesi Tenggara sebagai tuan rumah kegiatan strategis tersebut. Menurutnya, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam men-

dukung berbagai program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program pembangunan tiga juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa arahan pemerintah pusat menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Arahan pemerintah pusat menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjaga kondusifitas daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Alvin.

Secara historis, pembangunan nasional Indonesia sejak era reformasi selalu menempatkan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi. Data nasional menunjukkan bahwa berbagai periode pertumbuhan ekonomi tinggi, termasuk pascapemulihan krisis 1998 dan pascapandemi Covid-19, berlangsung bersamaan dengan kondisi sosial-politik yang relatif stabil. Di tingkat global, laporan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan OECD juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah memiliki korelasi kuat dengan efektivitas kebijakan publik, kualitas pelayanan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan jangka panjang. Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebagaimana ditekankan dalam forum Regional Sulawesi tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang. (*)

Bupati Buton Tengah Azhari Buka Piala Bupati Cup 2026, Diikuti 13 Tim Kasti



Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi memulai Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga masyarakat dan pengembangan potensi atlet daerah.

Pewartanya: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi memulai Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga masyarakat dan pengembangan potensi atlet daerah. Turnamen yang diikuti 13 tim dari berbagai wilayah di Buton Tengah itu dibuka langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, di Lapangan J. Wayong, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Senin (1/6/2026) sore.

Pembukaan turnamen ditandai dengan pemukulan bola pertama oleh Bupati Azhari sebagai simbol dimulainya kompetisi yang diharapkan menjadi sarana pembinaan, hiburan masyarakat, sekaligus memperterat hubungan antar-komunitas di daerah tersebut.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan, Staf Ahli TP PKK Kartini Adam Basan,

sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Gu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), tokoh masyarakat, serta para atlet dan pendukung masing-masing tim.

Dalam sambutannya, Azhari menegaskan bahwa olahraga memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar ajang kompetisi. Menurut dia, olahraga juga menjadi instrumen penting dalam membangun kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial masyarakat.

"Turnamen ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan membangun semangat persaudaraan di tengah masyarakat," kata Azhari.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah akan terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga masyarakat sebagai bagian dari

pembinaan generasi muda dan peningkatan prestasi daerah.

"Kami berkomitmen menghadirkan lebih banyak event olahraga agar menjangkau ruang pembinaan bakat dan lahirnya atlet-atlet berprestasi dari Buton Tengah," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga semangat fair play selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, nilai sportivitas merupakan fondasi utama dalam setiap kompetisi olahraga.

"Junjung tinggi sportivitas dan tetap menjaga persaudaraan selama bertanding. Kompetisi harus menjadi sarana memperkuat persatuan, bukan sebaliknya," katanya.

Secara historis, olahraga kasti merupakan salah satu cabang permainan tradisional yang telah lama berkembang di Indonesia dan banyak dimainkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Permainan ini memiliki kemiripan dengan sejumlah olahraga pukul-tangkap

yang berkembang di berbagai negara, termasuk rounders yang populer di Inggris sejak abad ke-19 dan menjadi salah satu dasar perkembangan olahraga bisbol modern di dunia.

Di tingkat nasional, turnamen olahraga berbasis komunitas seperti Piala Bupati Cup telah menjadi instrumen penting dalam pembinaan atlet daerah. Banyak atlet yang kemudian berkembang ke tingkat provinsi hingga nasional berawal dari kompetisi lokal yang rutin digelar pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan olahraga masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Turnamen Bola Kasti Piala Bupati Cup 2026, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga semakin meningkat, sekaligus membuka ruang lahirnya bibit-bibit atlet potensial yang dapat mengharumkan nama daerah pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. (*)

Literasi Jadi Fondasi SDM Unggul, Bupati Buton Dorong Pelajar Tingkatkan Daya Nalar



Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.

Pewartanya: La Harman

BUTON, BP- Pemerintah Kabupaten Buton terus memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter. Komitmen itu ditegaskan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, saat membuka Pembekalan Peserta Lomba Resensi Buku Tahun 2026 di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton tersebut diikuti pelajar tingkat SMA, SMK, MA, SMP, dan MTs dari berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Buton. Program ini bertujuan meningkatkan minat baca sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis melalui penulisan resensi buku.

Dalam kesempatan itu, Bupati Alvin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kualitas manusianya. Menurut dia, literasi merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Saya mengajak para siswa untuk berproses membentuk sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter. Mari bersama mewujudkan generasi yang literat, unggul, dan berdaya saing untuk mewujudkan Buton Bersinar," ujar Alvin di hadapan peserta pembekalan.

Selain membuka kegiatan, Bupati juga berdialog langsung dengan para peserta. Dalam sesi tersebut, ia memberikan motivasi agar para pelajar terus mengembangkan kemampuan membaca, menulis, serta memperluas wawasan sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

Menurut Alvin, Pemerintah Kabupaten Buton berkomitmen mendukung berbagai program literasi nasional melalui kebijakan dan kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Salah satunya diwujudkan melalui bimbingan teknis pembuatan resensi buku bagi pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat.

"Melalui kebijakan perpustakaan, pemerintah dapat memberikan sentuhan langsung kepada masyarakat dalam penguatan budaya literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah," katanya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan dewan juri dan materi yang memberikan pembekalan mengenai teknik membaca kritis, analisis isi buku, hingga penyusunan resensi yang baik. Bupati menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada generasi muda Buton.

"Saya berharap adik-adik mengikuti pembekalan ini dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari para pemateri yang

berpengalaman," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Buton bersama Bunda Literasi Kabupaten Buton, Maimunah Moko Syarifudin Saafa, menerima sumbangan buku karya Dr. Nadir La Djamudi, M.Pd yang juga bertindak sebagai dewan juri. Buku tersebut akan menambah koleksi Perpustakaan Daerah Kabupaten Buton dan memperkaya referensi bacaan masyarakat.

Secara historis, penguatan budaya literasi menjadi salah satu agenda nasional sejak pemerintah meluncurkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) pada 2016 untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia. Di tingkat internasional, UNESCO sejak lama menempatkan literasi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan daya saing bangsa di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Melalui pembekalan resensi buku ini, Pemerintah Kabupaten Buton berharap lahir generasi muda yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu mengolah informasi secara kritis, menyampaikan gagasan secara konstruktif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. (*)

BPOM Sita Kosmetik Impor Ilegal Rp27,6 Miliar dari Gudang Tangerang



Peliput: Andina L

TANGERANG, BP- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan peredaran jutaan produk kosmetik impor ilegal yang dipasarkan melalui platform perdagangan elektronik setelah menemukan gudang penyimpanan di Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari operasi tersebut, BPOM mengamankan kosmetik tanpa izin edar dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp27,6 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers hasil pengawasan pada Jumat (5/6/2026) mengatakan temuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya transaksi kosmetik melalui e-commerce.

"Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan 956 item kosmetik impor ilegal dengan jumlah mencapai 2.082.039 pieces dan nilai keekonomian sekitar Rp27,6 miliar," kata Taruna.

Produk yang diamankan didominasi kosmetik dekoratif atau rias wajah yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Selain tidak memiliki izin edar, produk tersebut

juga tidak dilengkapi dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi.

Menurut Taruna, hasil investigasi menunjukkan kosmetik ilegal tersebut masuk melalui forwarder umum yang diduga menjalankan praktik tidak sesuai ketentuan. Setelah berada di Indonesia, produk kemudian dipasarkan secara luas melalui berbagai platform digital sehingga berpotensi menjangkau konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses investigasi, produk ilegal tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen importasi yang lengkap sehingga diduga masuk melalui jalur tidak resmi," ujarnya.

BPOM menilai peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi ancaman serius karena keamanan, mutu, dan manfaat produk tidak dapat dipastikan. Risiko penggunaan produk semacam itu dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama jika mengandung bahan yang tidak memenuhi standar pengawasan.

"Kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik impor yang masuk ke Indonesia tanpa me-

enuhi ketentuan yang berlaku tidak dapat dijamin keamanan maupun mutunya," ujar Taruna.

Kasus ini terungkap setelah BPOM melakukan operasi intelijen berdasarkan laporan masyarakat serta pengawasan daring terhadap aktivitas perdagangan kosmetik. Penelusuran lanjutan mengarah pada keberadaan gudang yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan sekaligus distribusi produk ilegal tersebut.

Sebagai langkah awal penindakan, BPOM menghentikan sementara seluruh aktivitas di sarana tersebut dan mengamankan seluruh barang bukti. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta modus pelanggaran yang digunakan. Jika ditemukan unsur pidana, pelaku dapat dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

"BPOM tidak segan menegakkan sanksi tegas terhadap oknum pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi," tegas Taruna.

Secara historis,

peredaran kosmetik ilegal menjadi tantangan yang terus dihadapi banyak negara. Di Indonesia, BPOM hampir setiap tahun menemukan produk kosmetik tanpa izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Secara global, lembaga pengawas di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara Asia juga rutin melakukan penarikan produk kosmetik ilegal yang dijual secara daring karena meningkatnya perdagangan lintas negara melalui platform digital. Fenomena tersebut mendorong otoritas pengawas di berbagai negara memperkuat pengawasan e-commerce guna melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

BPOM mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan kosmetik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko kesehatan sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi. (*)

Bandung Jadi Percontohan Nasional Layanan JKN Lewat Koperasi Merah Putih

Peliput: Warman

BANDUNG, BP-Kota Bandung ditetapkan sebagai daerah pertama di Indonesia yang menjalankan uji coba layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Sebanyak 20 koperasi di tingkat kelurahan mulai melayani pembayaran iuran, penyebaran informasi JKN, hingga pengaktifan kembali kepesertaan yang nonaktif dalam program yang diluncurkan di Pendopo Kota Bandung, Kamis (21/5).

Langkah tersebut merupakan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kota Bandung untuk memperluas akses layanan jaminan kesehatan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan mitra pelayanan publik.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan pemilihan Bandung sebagai lokasi percontohan didukung kesiapan kelembagaan koperasi yang telah terbentuk di berbagai kelurahan. Saat ini Kota Bandung memiliki 151 kelurahan dan 20 di antaranya ditetapkan sebagai lokasi awal pelaksanaan program.

"KKMP harus menjadi titik awal gerakan bersama untuk membangun masyarakat perkotaan yang lebih sehat dan kuat. Koperasi juga harus memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat sekitar," kata Farhan.

Dalam skema yang diterapkan, koperasi

tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembayaran iuran JKN melalui sistem Payment Point Online Banking (PPOB), tetapi juga menjadi agen mitra BPJS Kesehatan yang bertugas melakukan edukasi, pendataan peserta, serta membantu mengaktifkan kembali peserta JKN yang statusnya tidak aktif.

Selain itu, koperasi juga dapat berperan menghimpun dan menyalurkan bantuan pembiayaan iuran dari berbagai sumber, seperti keuntungan usaha koperasi, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun donasi masyarakat untuk membantu peserta yang mengalami kendala pembayaran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa keikutsertaan koperasi dalam program tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat cakupan kepesertaan JKN secara nasional. Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 83 ribu Koperasi Merah Putih yang berpotensi menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan.

"Ada lebih dari 83.000 Koperasi Merah Putih di Indonesia yang berpotensi diberdayakan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan. Bandung menjadi lokus pertama setelah melalui proses kurasi dan analisis kelayakan," ujar Pujo.

Ia menambahkan, koperasi yang terlibat dalam program ini akan memperoleh imbal jasa berdasarkan transaksi yang dilakukannya. Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru bagi koperasi sekaligus memperkuat keberlan-

jutan pelayanan kepada masyarakat.

"KKMP yang bermitra dengan BPJS Kesehatan akan memperoleh imbal jasa per transaksi sehingga dapat menjadi alternatif sumber pendapatan baru bagi koperasi," kata Pujo.

Secara historis, Program JKN mulai diterapkan secara nasional pada 1 Januari 2014 sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam lebih dari satu dekade perjalanannya, JKN berkembang menjadi salah satu program asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan cakupan ratusan juta peserta. Di tingkat internasional, model perluasan akses layanan kesehatan berbasis komunitas juga diterapkan di sejumlah negara, seperti Thailand melalui Universal Coverage Scheme dan Rwanda melalui skema community-based health insurance, yang menempatkan organisasi masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar.

Sebanyak 20 KKMP yang menjadi peserta uji coba berasal dari Kelurahan Sukaluyu, Dago, Pasanggahan, Antapani Kulon, Burangrang, Babakan Surabaya, Sukapura, Palasari, Ciroyom, Sekeloa, Sekejati, Cipadung Kulon, Lebakgede, Sadang Serang, Karasak, Mekarjaya, Karang Pamulang, Paris Biru, Cibaduyut Kidul, dan Babakan Sari. Keberhasilan program ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan model serupa di berbagai daerah lain di Indonesia. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi</p> <h1>Baubau Post</h1> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasctio Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Dadan, Lodewyk, Sony Tersangka Proyek Motor Listrik hingga Sepatu BGN



Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Syarif Sulaeman Nahdi menyebut penetapan tersangka tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan korupsi mark up proyek pengadaan sejumlah barang antara lain motor listrik, sepatu, dan tablet.

Ketiga mantan pejabat BGN itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, dan pengadaan tv 75 inci sebanyak 5.400

unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up," kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung.

Kejagung menetapkan surat perintah penyidikan (sprindik) tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) di BGN pada 29 Mei.

Selang beberapa hari, Kejagung menggeledah beberapa tempat termasuk kantor BGN di Jakarta. Penggeledahan dilakukan dari Selasa malam hingga Rabu pagi.

Dalam penggeledahan Kejagung menyita sejumlah alat bukti. Aparat juga membawa Dadan, Lodewyk, dan Sony untuk diperiksa.

Setelah melalui proses pemeriksaan, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Para tersangka ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan.

Syarief berkata dari perkara dugaan mark up proyek pengadaan ini, negara mengalami kerugian. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan pasal 604 Juncto pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana keluar dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (3/6), dengan mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah muda atau pink.

Dadan keluar Gedung Kejagung sekitar pukul 17.10 WIB. Dia tertunduk lesu dan langsung masuk mobil tahanan. Ia mengabaikan permintaan wawancara sejumlah wartawan.

Dadan dibawa Kejagung setelah pada pagi hari, aparat kejaksaan melakukan penggeledahan di Gedung BGN, Jakarta, terkait dugaan korupsi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo

Subianto mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN. Selain Dadan, presiden juga mencopot Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dari posisi Wakil Kepala BGN.

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengaku mendapatkan informasi bahwa Dadan dicopot dari jabatannya diduga berkaitan jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung saat ditanya dugaan kasus jual beli dapur yang menjerat eks Kepala BGN, usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).

Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah mendengar informasi terkait permasalahan BGN sejak lama, dari berbagai sumber.*

MBG Diguncang Skandal, Kejagung Ungkap Yayasan Terafiliasi Petinggi BGN Raup Miliaran per Hari



Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan yayasan mitra serta pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaeman Nahdi, mengatakan para tersangka diduga melakukan intervensi terhadap proses pengadaan di lingkungan BGN sehingga penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan membuka ruang terjadinya mark up harga.

"Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada BGN, terdapat intervensi terhadap PPK sehingga penyusunan KAK tidak disusun sesuai kebutuhan riil dan ditemukan adanya mark up harga pengadaan," kata Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6).

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah pengadaan barang pendukung operasional MBG, antara lain 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, sekitar 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Seluruh pengadaan tersebut diduga tidak sesuai ketentuan dan mengalami penggelembungan harga.

Selain pengadaan barang, Kejagung juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam penunjukan

yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sejumlah yayasan yang tidak memenuhi persyaratan diduga tetap diloloskan menjadi mitra melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan terafiliasi dengan saudara DH, saudara SS, dan saudara LP," ujar Syarif.

Menurut penyidik, afiliasi tersebut dilakukan melalui pihak lain sehingga yayasan yang secara formal tidak tercatat atas nama para tersangka tetap diduga berada dalam kendali mereka. "Terafiliasi berarti dimiliki atau dikendalikan melalui orang lain," kata Syarif menjelaskan.

Kasus ini menjadi perhatian karena terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional. Pada tahun 2025, program tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp85,20 triliun dari APBN. Sementara pada tahun 2026, anggarannya direncanakan meningkat menjadi Rp268 triliun untuk memperluas cakupan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Kejagung mengungkapkan bahwa penyelidikan perkara ini berlangsung sekitar satu minggu sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, pendalaman terhadap dugaan penyimpangan telah dilakukan sebelumnya berdasarkan berbagai informasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan.

"Terdapat beberapa laporan dari masyarakat mengenai dapur-dapur yang diduga tidak sesuai spesifikasi maupun ketentuan. Dari situlah kami

melakukan pendalaman," ujar Syarif.

Saat ini, ketiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara historis, program bantuan makanan bagi anak sekolah dan kelompok rentan telah diterapkan di berbagai negara. Program National School Lunch Program di Amerika Serikat misalnya telah berjalan sejak 1946 dan melayani jutaan pelajar setiap hari. Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) juga menjadi salah satu program pangan sekolah terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, sejumlah program bantuan pangan dan perbaikan gizi telah dijalankan pemerintah sejak dekade 1990-an, namun Program MBG menjadi program nasional dengan skala anggaran dan cakupan penerima manfaat yang jauh lebih besar.

Kejagung menyatakan penyelidikan masih terus dikembangkan, termasuk menginventarisasi yayasan-yayasan SPPG yang diduga terafiliasi dengan para tersangka. Penyidik akan berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan seluruh mitra program memenuhi persyaratan dan mencegah terulangnya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar tersebut.*

Usulan Agenda Tambahan Warnai Pembukaan Masa Sidang III DPRD Baubau Tahun 2025-2026



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau resmi membuka Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 setelah menutup Masa Sidang II dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Baubau, Rabu (3/6/2026). Agenda tersebut menjadi penanda dimulainya pembahasan berbagai program dan kebijakan strategis daerah pada semester berikutnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau, ST didampingi Wakil Ketua I Natas Aryu Prawira Tamim, SM, MM dan Wakil Ketua II Adriansyah Farmin, ST. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota Baubau.

Dalam pembukaan Masa Sidang III, Ardin Jufri memaparkan sejumlah agenda yang telah disusun untuk menjadi fokus kerja DPRD. Ia juga meminta pandangan anggota dewan terhadap agenda yang akan dijalankan selama masa per-

sidangan tersebut. "Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 secara resmi kami buka," ujar Ardin Jufri dalam rapat paripurna.

Pembahasan agenda sidang mendapat tambahan usulan dari Wakil Ketua II DPRD Adriansyah Farmin. Usulan tersebut berupa penambahan satu kegiatan dalam agenda Masa Sidang III dan memperoleh dukungan dari anggota DPRD lainnya, termasuk Ahdiyati Zamani, ST, MT. "Kami mengusulkan adanya tambahan satu kegiatan yang dinilai penting untuk dimasukkan dalam agenda masa sidang berikutnya," kata Adriansyah Farmin.

Sebelum membuka Masa Sidang III, DPRD terlebih dahulu menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026. Dalam laporan yang dibacakan Sekretaris DPRD Kota Baubau Yaya Wirahyahman, S.STP., MKP, disebutkan bahwa selama masa sidang tersebut DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pen-

gawasan melalui berbagai agenda kelembagaan. "Seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan," ujar Yaya Wirahyahman.

Data Sekretariat DPRD menunjukkan selama Masa Sidang II telah dilaksanakan lima rapat paripurna, empat rapat Badan Musyawarah, satu rapat internal pimpinan, dua rapat internal panitia khusus, dua rapat internal komisi, dua rapat komisi bersama mitra kerja, dua rapat kerja atau rapat dengar pendapat gabungan komisi, satu rapat Badan Anggaran, serta lima rapat Badan Kehormatan.

Selain itu, DPRD menerima lima aspirasi melalui aksi unjuk rasa dan audiensi, melaksanakan dua kunjungan lapangan, satu kegiatan tingkat provinsi dan nasional, enam konsultasi dalam provinsi, enam konsultasi luar provinsi, satu kajian antar daerah, lima kegiatan workshop atau bimbingan teknis, serta satu kali reses. "Capaian ini menjadi bagian dari upaya meningkat-

kan kualitas fungsi pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Yaya.

Secara historis, mekanisme masa sidang merupakan instrumen penting dalam sistem parlementer modern. Di Indonesia, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara secara internasional, model pembagian masa sidang telah lama diterapkan di berbagai parlemen dunia seperti Parlemen Inggris dan Kongres Amerika Serikat untuk memastikan kesinambungan proses legislasi, pengawasan pemerintahan, serta penyerapan aspirasi publik.

Paripurna ditutup dalam suasana khidmat dengan harapan meningkatnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Ketua DPRD menegaskan bahwa seluruh agenda yang telah disusun diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Baubau pada tahun anggaran berjalan. (*)

Pemkot Baubau Libatkan Kejaksaan dalam Rencana Perpanjangan Sewa Lahan PT Daya Mitra



Pewarta: Ardi

BAUBAU, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggandeng Kejaksaan Negeri Baubau untuk mengawal rencana perpanjangan perjanjian sewa lahan dengan PT Daya Mitra sebagai upaya memastikan seluruh proses pemanfaatan aset daerah berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut dibahas dalam rapat pemaparan yang berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Baubau, Rabu (4/6/2026).

Rapat dipimpin Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Baubau, Dedykarto Ansiga, S.H., M.H., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, S.STP., M.Si. Turut hadir Kepala Seksi Pidana Umum Dedi Wahyudie, S.H., M.H., Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti La Ode Muh. Firman, S.H., M.H., beserta jajaran staf Kejaksaan Negeri Baubau.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Baubau, Dahrul Dahlan, menjelaskan bahwa konsultasi tersebut dilakukan karena PT Daya Mitra berencana memperpanjang masa sewa atas lahan milik pemerintah daerah. Menurutnya, setiap pemanfaatan aset daerah harus dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di masa mendatang.

"Karena menyangkut aset daerah, maka prosesnya harus dikembalikan kepada syarat-syarat dan ketentuan perizinan sewa aset yang berlaku," kata Dahrul usai rapat.

Ia menegaskan, Pemkot Baubau membutuhkan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memastikan seluruh tahapan administrasi maupun proses perpanjangan sewa dapat dilaksanakan secara benar. "Melalui pertemuan ini, kami ingin mendapatkan pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara, sehingga setiap tahapan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang," ujarnya.

Menurut Dahrul, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Baubau menjadi langkah awal untuk memperoleh rekomendasi hukum yang komprehensif terkait kelayakan perpanjangan sewa dan mekanisme yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah. "Nantinya dari hasil pendampingan tersebut akan diketahui bagaimana rekomendasi yang diberikan, apakah proses ini dapat dilanjutkan dan seperti apa mekanisme yang harus ditempuh," katanya.

Lebih lanjut, Dahrul berharap arahan yang diberikan Jaksa Pengacara Negara dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan aset. "Dengan

adanya arahan dan rekomendasi dari Jaksa Pengacara Negara, seluruh proses dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tuturnya.

Upaya Pemkot Baubau tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mendorong tata kelola aset daerah yang lebih profesional. Berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, setiap bentuk pemanfaatan aset pemerintah harus dilakukan secara tertib administrasi, memberikan manfaat ekonomi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Secara historis, penguatan tata kelola aset publik juga menjadi tren global. Berbagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak awal 2000-an menerapkan prinsip manajemen aset publik berbasis transparansi dan mitigasi risiko hukum guna mencegah sengketa serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Langkah yang ditempuh Pemkot Baubau melalui pendampingan hukum Kejaksaan mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan aset publik. (*)